OMBUDSMAN RI DAN UNIVERSITAS TIMOR JALIN KERJA SAMA

Rabu, 30 Juli 2025 - Nurul Istiamuji

Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia resmi menjalin kerja sama dengan Universitas Timor (Unimor) Kefamenanu melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang digelar pada Kamis (30/07/2025) di Gedung Ombudsman RI. Kerja sama ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro menyampaikan bahwa dengan nota kesepahaman ini dapat mulai direncanakan hal-hal yang bisa ditawarkan untuk implementasi. Misalnya apa saja yang menjadi kekuatan Universitas Timor untuk membantu mengatasi masalah pelayanan publik di wilayahnya. Ia mengatakan kampus sumber daya yang bisa dioptimalisasi dengan bersinergi dengan Ombudsman.

"Hal ini menjadi tantangan bersama. Karena di internal sendiri kami masih evaluasi seberapa efektif kerja sama dapat memberi manfaat bagi kedua belah pihak," jelas Johanes.

Senada, Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan bahwa kerja sama ini bukan sekadar pertukaran dokumen, melainkan pondasi yang kuat untuk tindak lanjut yang lebih mendalam. Katanya, Unimor sebagai kampus yang memiliki banyak mahasiswa memiliki potensi besar untuk terlibat dalam riset bersama yang dapat memperbaiki pengelolaan pelayanan publik di daerah ini

"Saya kira ini akan menjadi kerja sama yang saling menguntungkan. Pikiran segar mahasiswa dapat menjadi kontribusi pada kami dan para mahasiswa dapat belajar juga dari Ombudsman yang mengawasi hampir semua kerja-kerja pemerintah," kata Robert.

Sementara itu, Rektor Universitas Timor Stefanus Sio, menyambut baik kerja sama ini dan menyebutnya sebagai langkah penting dalam memenuhi tuntutan regulasi yang mengharuskan perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam memberikan dampak positif kepada masyarakat. "Sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, Unimor berkomitmen untuk tidak hanya mengedepankan pendidikan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui pengawasan yang lebih baik terhadap pelayanan publik," ujarnya.(NI)